

Eksistensi Integrasi Ekonomi ASEAN Pada Aspek Economic Security di Indonesia Tahun 2020-2021

Siti Ghina Fauziah¹, Made Fitri Maya Padmi¹, Dinar Ayu Chandra Agustin²

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

² Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: made.padmi@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 secara nyata memberikan gambaran bahwa ancaman keamanan manusia, dalam hal ini adalah keamanan kesehatan, dapat memberikan dampak yang besar pada aspek sosial-ekonomi suatu negara. Ketahanan Ekonomi atau Economic Security menjadi dampak yang paling dirasakan setelah dampak Kesehatan. Pandemi ini membawa dampak ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari penurunan Pendapatan Domestik Bruto suatu negara, meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan di suatu negara, termasuk Indonesia. Berbagai upaya nasional dan internasional dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal ini. Upaya regional sesama negara ASEAN juga dilakukan melalui kerangka kerja sama Integrasi Ekonomi ASEAN. Karya tulis ini mencoba untuk menjelaskan kerja sama negara-negara ASEAN dalam penanggulangan dampak pandemi terutama dalam hal pemulihan economic security di Indonesia di tahun 2020 hingga 2021.

Keywords: *Integrasi Ekonomi ASEAN, Economic Security, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

Penyebaran wabah Covid-19 telah menggemparkan masyarakat internasional, menurut informasi dari *New York Times* (2021) virus ini berawal dari Wuhan, China. Pada tanggal 31 Desember 2019, Pemerintah China melaporkan secara resmi munculnya Covid-19 kepada *World Health Organization* (BBC, 2020). Covid-19 telah menyebar secara pesat ke berbagai negara, bahkan 3 bulan setelah otoritas China melaporkan kemunculannya kepada WHO, tepatnya pada bulan Maret 2020 Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 100 negara (Mukaromah, 2020). Karena penyebarannya yang sangat pesat, WHO menetapkan wabah virus Corona ini sebagai pandemi, hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO. Hingga 11 Maret 2020 kasus terkonfirmasi sudah lebih dari 118.000 kasus dan 4291 kematian yang dilaporkan dari 114 negara (World Health Organization). Kemudian pada 28 Desember 2020 kasus terkonfirmasi telah mencapai 4.160.423 kasus, dengan 82.127 angka kematian di dunia. Dan hingga 27 Desember 2021 kasus terkonfirmasi mencapai 9.545.787 kasus, dengan angka kematian 43.655 di dunia (World Health Organization, 2022)

Dikawasan ASEAN pada 17 Oktober 2020 jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 telah mencapai 869,515 kasus dan 21,076 kematian. Pada 27 Desember 2021 kasus terkonfirmasi di ASEAN mencapai 135.147 kasus (World Health Organization, 2022). Disamping itu, pada Agustus 2020 Indonesia menjadi negara dengan persentase kematian tertinggi di ASEAN yaitu sebesar 4.56 persen (Djalante, 2020) dan hingga 20 Desember 2020 jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia telah mencapai 103.239 kasus dengan 541.811 sembuh dan 19.880 kematian (Meydhalifah, 2020). Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memutus rantai penularan Covid-19, mulai dari pembatasan sosial hingga *lockdown* (Djalante, 2020). Tindakan pembatasan yang dilakukan negara anggota ASEAN untuk memutus rantai penularan Covid-19 sangat mempengaruhi berbagai aspek termasuk ekonomi, dimana pada tahun 2020 ekonomi kawasan turun menjadi 3.3 persen dari 4.5 persen di tahun 2019 (International Labour Organization, 2021).

Sebelumnya, ekonomi kawasan Asia Tenggara telah mengalami gangguan akibat dari ketegangan perdagangan global saat virus muncul yang kemudian diperparah oleh kebijakan pembatasan serta penutupan di kawasan. Sektor perekonomian yang sangat terganggu di kawasan Asia Tenggara merupakan sektor UKM, pariwisata serta jasa. (OECD, 2020). Lebih rinci, pada tahun 2020 persentase pekerja yang kehilangan jam kerjanya di ASEAN mencapai 8.4 persen, 6.7 juta lapangan pekerjaan mengalami penurunan yang signifikan, pendapatan tenaga kerja yang hilang mencapai 7.8 persen dan lebih dari 6.7 juta pekerja meninggalkan pekerjaannya yang menjadikan mereka tidak aktif dalam kegiatan ekonomi dan sebagian dari mereka telah putus asa untuk mencari lapangan pekerjaan. Hal tersebut kemudian menyumbang peningkatan jumlah pengangguran di kawasan ASEAN pada tahun 2020 dengan jumlah persentasi sebesar 3.1 persen, angka tersebut meningkat dibanding 2019 yang hanya berjumlah 2.5 persen (International Labour Organization, 2021).

Di Indonesia, upaya yang dilakukan bukanlah *lockdown*, melainkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 (Mashabi, 2020). Pemberlakuan PSBB sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia karena kegiatan ekonomi di Indonesia terhenti meskipun ada beberapa sektor kebutuhan yang masih diperbolehkan untuk melakukan produksinya (Wijaya, 2020). Kendati demikian, lebih banyak kegiatan ekonomi yang terhenti akibat penerapan PSBB dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia. Pada kuartal II-2020, perekonomian Indonesia menurun hingga minus 5,32 persen. Hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi yang terhenti ketika penerapan PSBB. Selain itu PSBB juga berdampak pada terjadinya PHK besar-besaran yang dilakukan beberapa perusahaan karena tidak ada kegiatan produksi (CNBC Indonesia, 2020).

Berdasarkan berita resmi yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (2020) pada 5 November, hingga Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,07 persen, dimana hal ini meningkat 1,84 persen dari Agustus 2019 yang berjumlah 5,23 persen dan Agustus

2018 dengan jumlah 5,30 persen. Ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 atau dalam persentase yaitu sebesar 14,28 persen dengan rincian 2,56 juta orang pengangguran, 0,76 juta orang Bukan Angkatan Kerja (BAK), 1,77 juta orang pengangguran, 24,03 juta orang bekerja dengan pemotongan jam kerja. Berdasarkan hasil Sakernas pada Agustus 2020, rata-rata upah buruh dalam jangka waktu 1 tahun tersebut turun 5,20 persen dari 2,91 juta rupiah menjadi 2,76 juta rupiah. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penurunan tertinggi yaitu sebesar 17,28 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dampak ekonomi dari Covid-19 serta pembatasan kegiatan untuk memutus penularan Covid-19 berefek domino kepada sektor lainnya, termasuk dampak sosial. Hilangnya sumber penghasilan menyebabkan peningkatan pengangguran yang berakibat pada kelaparan, kemiskinan hingga putus sekolah pada anak. Selain itu dampak sosial yang terjadi akibat pembatasan kegiatan juga meningkatkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (OECD, 2020). Hal tersebut menjadi tambahan beban bagi negara dan kawasan yang kemudian harus melakukan berbagai tindakan agar tidak semakin memburuk.

Permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan keamanan pendapatan, keamanan kerja serta keamanan pasar tenaga kerja ini termasuk kedalam komponen *economic security* sebagai elemen dasar *human security*. *Economic security* juga menjadi fokus ASEAN. Oleh karena itu ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara mempunyai peran yang signifikan untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap ekonomi kawasan karena organisasi ini menjadi wadah untuk meningkatkan kerjasama serta menanggulangi berbagai permasalahan di Asia Tenggara. Banyak kerjasama yang telah dilakukan negara anggota ASEAN selama ini. Pada bidang ekonomi sendiri, ASEAN mengintegrasikan ekonominya untuk meningkatkan ekonomi kawasan, yaitu melalui *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* serta *ASEAN Economic Community (AEC)* (Kompas Pedia, 2020).

Untuk menangani Covid-19 serta dampak dari Covid-19, banyak kerjasama yang telah dilakukan ASEAN baik dalam bidang pariwisata, kesehatan serta ekonomi. ASEAN telah melakukan berbagai pertemuan sejak Februari 2020 lalu dan dari pertemuan-pertemuan tersebut telah menghasilkan berbagai strategi yang akan dan telah dilakukan negara anggota ASEAN (Purwanto, 2020). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan ASEAN untuk menangani dampak ekonomi akibat Covid-19 dan implikasinya di Indonesia pada tahun 2020-2021.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang nantinya akan menjelaskan secara deskriptif suatu fenomena penelitian berdasarkan realita empiris. Di samping itu, dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud berupa buku, artikel *online*, jurnal ilmiah, sumber berita terpercaya serta laporan resmi pemerintah. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk selanjutnya ditarik benang merah dari permasalahan yang ada dan disimpulkan.

PEMBAHASAN

Integrasi Ekonomi ASEAN

Setelah pembentukan ASEAN, para pemimpin ASEAN berfokus pada harmonisasi kawasan dan pengembangan kerjasama ekonomi. Pada 1969 menteri luar negeri negara anggota ASEAN mengadakan studi kerjasama ekonomi yang dilaksanakan oleh PBB. Laporan yang dihasilkan yaitu *Kanzu Report* pada 1972 dan baru dipublikasikan secara luas pada 1974. *Kanzu Report* mengusulkan liberalisasi perdagangan melalui selektif, negosiasi tarif produk, pengaturan kesepakatan paket proyek industri besar dan kerjasama keuangan. Selain kerjasama pada bidang industri, kerjasama ini juga mencakup ke dalam kerjasama pertanian, pariwisata, transportasi serta telekomunikasi (Hill & Menon, 2010)

Kemudian, dalam pertemuan Bali Summit pada Februari 1976 ASEAN membentuk berbagai perjanjian kerjasama ekonomi pada masing-masing bidang. Terdapat 4 bidang perjanjian kerjasama ekonomi yang dihasilkan, yaitu *ASEAN Preferential Trading Agreement (APTA)*, *the ASEAN Industrial Projects (AIPs)*, *the ASEAN Industrial Complementation (AIC)* and *the ASEAN Industrial Joint Ventures (AIJVs)*. Dari keempat kerjasama tersebut tidak ada yang berdampak secara signifikan pada kawasan. APTA memiliki sedikit dampak pada perdagangan intra-regional kawasan. Namun, APTA juga memiliki banyak kekurangan yang menimbulkan kegagalan dalam menangani hambatan non-tarif, dimana pemotongan tarif terlalu kecil untuk terlihat pada efek perdagangan dan implementasinya yang dilakukan dengan setengah hati. Kegagalan tersebut kurang lebih terjadi karena keengganan serta ketidaksiapan kawasan terhadap liberalisasi perdagangan serta sistem integrasi itu sendiri (Hill & Menon, 2010).ss

Mengatasi kegagalan tersebut, ASEAN membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada KTT ASEAN Ke-4, 28 Januari 1992 di Singapura (Ketua Dewan MEA Indonesia, 2021). Dimana semua barang perdagangan masuk dalam AFTA kecuali yang dikecualikan secara eksplisit. Enam pemimpin ASEAN sepakat untuk mengurangi nilai tarif preferensial efektif bersama (CEPT) sebesar 0%-5% pada 2008 dengan sementara target 20% pada 1998-2000. Kemudian batas waktu CEPT dimajukan ke tahun 2005 pada KTT ASEAN kelima tahun 1995, setelahnya kembali dimajukan ke tahun 2003 (Hill & Menon, 2010).

Selain itu, ASEAN juga membentuk kerjasama ekonomi di bidang jasa, yaitu ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang disahkan pada KTT ASEAN, 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. AFAS merupakan salah satu kerjasama untuk mencapai integrasi ekonomi di bidang jasa dan sebagai dasar yang mengarah pada liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN. Pembentukan AFAS didasarkan pada pertumbuhan sektor jasa yang menyumbang 40%-50% di kawasan dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan ini ASEAN memandang perlunya pembentukan integrasi ekonomi serta liberalisasi pada bidang jasa. Setelahnya, ASEAN kembali membentuk perjanjian kerjasama dalam bidang jasa yang lebih transparan, komperhensive dan *predictable*, perjanjian tersebut dikenal dengan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) (Qothrunnada, 2021). Sebagai salah satu upaya untuk

meningkatkan perekonomian nasional, Indonesia pun akan meratifikasi ATISA melalui Peraturan Presiden yang saat ini masih dalam proses pengesahan (Hill & Menon, 2010).

Disamping itu, ASEAN juga resmi meluncurkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 31 Desember 2015. MEA terdiri dari empat pilar sebagai berikut :

1. Pasar dan basis produksi tunggal;
2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi;
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan; dan
4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Suatu kegiatan memerlukan cetak biru (blueprint) sebagai pedoman dari kegiatan itu sendiri, begitupun dengan MEA. Berdasarkan pernyataan laman resmi ASEAN (Association of SouthEast Asia Nations, 2022), bahwa cetak biru MEA pertama kali diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 tahun 2007 untuk memandu perkembangan MEA dari 2016-2025. Namun dijadikannya cetak biru sebagai pemandu perkembangan MEA disepakati pada KTT ASEAN Ke-27 tahun 2015. Cetak biru ASEAN meliputi lima karakteristik, yaitu sebagai berikut :

1. Perekonomian yang sangat terintegrasi, sistematis dan terorganisir;
2. ASEAN yang Kompetitif, Inovatif, dan Dinamis;
3. Peningkatan Konektivitas dan Kerjasama Sektoral;
4. ASEAN yang Tangguh, Inklusif, Berorientasi pada Rakyat, dan Berpusat pada Rakyat; dan
5. Global ASEAN, yang kemudian terdiri dari berbagai sektor dan langkah-langkah yang strategis.

Implementasi cetak biru MEA tahun 2015, ditentukan *scorecard* yang berisi *deliverables* berikut : 611 langkah aksi kategori *Full Scorecard*; 506 langkah aksi kategori *Focused Base*. Hingga akhir tahun 2017, terdapat 61% program dari MEA yang telah berhasil dilaksanakan. Dari 46 prioritas yang belum terimplementasikan, 12 diantaranya telah terimplementasi oleh negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia sendiri telah mengimplementasikan 85 dari 118 prioritas tersebut. Ruang lingkup kerja sama ekonomi ASEAN ini mencakup bidang perindustrian, investasi, perdagangan, pariwisata, jasa dan transportasi, telekomunikasi, serta keuangan. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Kementerian Luar Negeri republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan dari rilis informasi pada portal Kementerian Luar Negeri RI di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi ASEAN relatif tinggi dengan rata-rata 5%-6% per tahun. Sebagai upaya penyetaraan pembangunan antara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dengan CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam), ASEAN membentuk *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*. Awalnya IAI dilaksanakan pada bidang ekonomi seperti, iklim investasi, eneri, SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas integrasi kawasan, pariwisata, pengentasan masyarakat

miksin serta peningkatan kualitas hidup. Akan tetapi pada perkembangannya cakupannya telah diperluas mencakup politik dan keamanan serta sosial budaya. Disamping itu, atas usulan Indonesia, ASEAN menyepakati *ASEAN Framework on Equitable Economic Development* (AFEED) yang berfokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, menguatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan sosial, mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta partisipasi yang lebih luas dalam proses integrasi ASEAN (Kementerian Luar Negeri republik Indonesia, 2015).

Isu lainnya yang dibahas pada Pillar Ekonomi ASEAN adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Dimana pada KTT ASEAN ke-19 tahun 2011 saat Keketuaan Indonesia, para Pemimpin ASEAN sepakat untuk mengkonsolidasikan perjanjian *ASEAN Free Trade Agreement + 1* (FTA +1) yang telah ada dan membentuk *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Berdasarkan informasi Kementrian Luar Negeri TI melalui laman resminya, kesepakatan RCEP telah memasuki putaran ke-21 di Yogyakarta, Indonesia pada 5-9 Februari 2018. Perundingan baru berhasil menyelesaikan 2 chapter dari 18 chapter yang direncanakan yaitu terkait *Economic and Technical Cooperation* (ECOTECH) pada putaran ke-15 di Tianjin, Oktober 2016 dan *chapter* terkait *Small and Medium Enterprises* (SMEs) pada putaran ke-16 di Banten, Desember 2016 (Kementerian Luar Negeri republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas, ASEAN melakukan integrasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kawasan serta berupaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Economic Security

Economic security merupakan salah satu bagian elemen dasar *human security*. Setelah perang dingin, prioritas keamanan bergeser dari keamanan negara kepada keamanan manusia. Konsep keamanan kemanusiaan semakin berkembang, segala aspek yang mengancam manusia maka termasuk ke dalam *human security*. Salah satu aspek yang mengancam manusia yaitu ancaman ekonomi, dari sinilah *economic security* muncul. *Economic security* memiliki 2 ancaman utama, yaitu kemiskinan dan pengangguran (Hakim & Amalia, 2020). *Economic security* terdiri dari keamanan sosial dasar yang dapat ditentukan oleh akses kepada infrastruktur yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, informasi, perlindungan sosial serta keamanan pekerjaan (ILO). Selain itu, dalam *economic security* terdapat 7 komponen sebagai berikut :

1. *Income security*, jaminan pendapatan menunjukkan pendapatan aktual, yang dirasakan dan diharapkan yang memadai, baik yang diperoleh dalam bentuk jaminan sosial dan manfaat lainnya. Ini mencakup tingkat pendapatan yang bersifat mutlak dan relatif terhadap kebutuhan, jaminan penerimaan, harapan pendapatan saat ini dan masa depan, baik selama kehidupan kerja maupun di hari tua atau pensiun cacat.

Mekanisme perlindungan pendapatan klasik termasuk mesin upah minimum, indeksasi upah, jaminan sosial yang komprehensif, serta perpajakan progresif.

2. *Representation security*, keamanan representasi mengacu pada representasi individu dan representasi kolektif. Representasi individu adalah tentang hak individu yang diabadikan dalam undang-undang serta akses individu ke institusi. Representasi kolektif berarti hak setiap individu atau kelompok untuk diwakili oleh suatu badan yang dapat menawar atas nama mereka dan yang cukup besar, cukup independen, dan cukup kompeten untuk melakukannya. Serikat pekerja independen dengan hak untuk berunding bersama mengenai upah, tunjangan, dan kondisi kerja serta untuk memantau praktik kerja dan pemogokan telah menjadi bentuk tipikal pemberian keamanan bagi para perwakilan/representator.
3. *Labour market security*, keamanan pasar tenaga kerja muncul ketika ada banyak peluang untuk kegiatan yang kemudian menghasilkan pendapatan yang memadai. Hal ini memiliki komponen struktural yang mewakili jenis dan kuantitas peluang. Selain itu, ia memiliki sisi kognitif karena menampilkan harapan bahwa peluang telah atau akan menjadi memadai. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan bentuk keamanan ini termasuk yang berorientasi pada pekerjaan penuh kebijakan ekonomi makro, penciptaan agen tenaga kerja, serta layanan penempatan lainnya.
4. *Employment security*, keamanan kerja adalah perlindungan terhadap hilangnya pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Untuk pekerja berupah dan gaji, keamanan kerja ada di organisasi dan negara, di mana ada perlindungan kuat terhadap pemecatan yang tidak adil atau sewenang-wenang dan pekerja juga dapat memperbaiki pemecatan yang tidak adil. Untuk wiraswasta, itu berarti perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan mandiri secara tiba-tiba atau juga dapat disebut kegagalan bisnis. Bentuk-bentuk khas untuk meningkatkan keamanan kerja adalah perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang, peraturan tentang perekrutan dan pemecatan, serta pengenaan biaya pada majikan karena gagal mematuhi peraturan.
5. *Job security*, keamanan kerja dalam hal ini menandakan adanya kesempatan dalam pasar tenaga kerja yang memungkinkan pekerja menentukan konten pekerjaan dan peluang untuk membangun karier. Sementara keamanan kerja mengacu pada kesempatan seorang pekerja untuk terus bekerja di suatu perusahaan, keamanan kerja mengacu pada kemampuan pekerja untuk mengejar suatu bidang pekerjaan dalam hubungannya dengan minat, pelatihan, dan keterampilannya. Mekanisme perlindungan terdiri dari hambatan terhadap keterampilan seperti batas kerajinan, kualifikasi pekerjaan, praktik pembatasan, serikat pekerja, dll.
6. *Work security*, keamanan kerja ini menunjukkan kondisi kerja dalam organisasi atau perusahaan yang aman dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ketentuan klasik "kesehatan dan keselamatan kerja" yang melindungi pekerja dari bahaya, penyakit,

dan cedera kerja merupakan bagian integral. Namun, keamanan kerja melampaui ini, dalam mengatasi sesuatu yang menakutkan akhir-akhir ini seperti stres, kerja berlebihan, ketidakhadiran, dan pelecehan. Perangkat perlindungan untuk keamanan kerja meliputi ketentuan dan asuransi terhadap kecelakaan dan penyakit di tempat kerja, serta batasan waktu kerja.

7. *Skill reproduction security*, keamanan reproduksi keterampilan menunjukkan akses pekerja ke pendidikan dasar serta pelatihan kejuruan untuk mengembangkan kapasitas dan memperoleh kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang bernilai secara sosial dan ekonomi. Cara-cara untuk meningkatkan keamanan reproduksi keterampilan mencakup kebijakan untuk menghasilkan peluang tersebar luas untuk memperoleh dan mempertahankan keterampilan melalui pendidikan, pemagangan serta pelatihan kerja.

Jadi, istilah keamanan ekonomi adalah jaminan pendapatan yang memadai baik selama kehidupan kerja maupun setelah pensiun serta pensiun cacat. Dan istilah ketidakamanan ekonomi adalah risiko atau ancaman pendapatan yang tidak memadai. Berdasarkan penelitian dari *National Academy of Social Insurance* (2022) untuk mudah memahami keamanan ekonomi dan ketidakamanan ekonomi dapat disamakan dengan status ekonomi, di mana status ekonomi dapat di klasifikasikan. Namun, ada kekurangan dari pernyataan tersebut, karena kemiskinan memang akan menjadikan ketidakamanan ekonomi, di samping itu bukan berarti pendapatan besar tidak rawan akan ketidakamanan ekonomi. Karena pada dasarnya upah/gaji besar akan memacu pengeluaran hidup yang besar pula, termasuk menggunakan kredit baik kredit melalui bank maupun institusi lainnya. Pendapatan upah besar pekerja yang didapatkan dari perusahaan berpotensi terancam oleh pemecatan sehingga pendapatan dari upah kerja juga berpotensi mengalami ketidakamanan ekonomi. Jadi pada dasarnya keamanan serta ketidakamanan ekonomi tidak terukur, jikapun terukur maka banyak faktor serta instrument yang digunakan sehingga sulit untuk dijadikan pedoman sebagai tolak ukur keamanan serta ketidakamanan ekonomi. Namun demikian, karena sulit untuk menemukan tolak ukur tersebut, maka para peneliti tersebut tetap memakai tolak ukur ekonomi. Begitupun dengan penelitian ini yang akan mengukur ketidakamanan ekonomi dari tingkat pertumbuhan PDB, jumlah pengangguran, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan serta jumlah pendapatan masyarakat Indonesia yang dibandingkan antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dalam pengukuran besar pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB) (Fahrika & Roy, 2020).

Selanjutnya, penyebaran Covid-19 yang sangat pesat membuat pemerintah merespon dengan membatasi kegiatan masyarakat, termasuk Indonesia. Di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah *lockdown*, melainkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 (Mashabi, 2020). Pemberlakuan PSBB sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia karena kegiatan ekonomi di Indonesia terhenti meskipun ada beberapa sektor kebutuhan yang masih

diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksinya (Wijaya, 2020). Kendati demikian, lebih banyak kegiatan ekonomi yang terhenti akibat penerapan PSBB dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemberlakuan PSBB disejumlah wilayah sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia (CNBC Indonesia, 2020).

Dampak terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2019. Di mana PDB Indonesia tahun 2019 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 15,8 triliun dengan PDB Perkapita mencapai Rp. 59,1 juta atau US\$174,9 (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan PDB Indonesia tahun 2020 hanya mencapai Rp. 15.434,2 triliun dengan jumlah PDB Perkapita mencapai Rp. 56,9 juta atau US\$3911,7 (BPS, 2021). Akan tetapi, PDB Indonesia pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2019 dan 2020, di mana nilainya mencapai Rp. 16.970,8 triliun dengan PDB Perkapita sebesar Rp. 62,2 juta atau US\$ 4.349,5 (Badan Pusat Statistik, 2022). Selain itu, dampak lainnya dapat ditemukan pada bidang ketenagakerjaan, pasalnya pada tahun 2020 dalam kurun waktu satu tahun terakhir, jumlah persentase pekerja setengah menganggur serta persentase pekerja dengan paruh waktu juga mengalami kenaikan. Terdapat 29,12 juta orang 14,28 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang terdampak Covid-19 sebanyak 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,77 juta orang, serta penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang. Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebanyak 7,07 persen, hal ini mengalami kenaikan sebesar 1,84 persen dari Agustus 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Selebihnya, terdapat 21,32 juta orang yang berarti 10,32 persen penduduk usia kerja yang terkena dampak COVID-19. Selain itu juga terdapat pengangguran karena COVID-19 sebanyak 1,82 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 700 ribu orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1,39 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 17,41 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2021).

Selanjutnya, yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang dengan persentase 10,19 persen, di mana nilai tersebut meningkat 1,13 juta orang dengan persentase 0,41 persen poin dibanding Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang dengan persentase 0,97 persen dari September 2019. Jadi, besar Garis Kemiskinan per rumah tangga yaitu sebesar Rp. 2.216.714,-/per rumah tangga miskin/bulan (Badan Pusat Statistik, 2021). Pembatasan mobilisasi masyarakat, pengurangan jumlah pekerja oleh perusahaan menjadi penyumbang terbesar naiknya angka kemiskinan di Indonesia.

Di tahun 2021, perlahan kondisi perekonomian masyarakat Kembali bangkit meski angkanya belum signifikan. Pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar juta orang dengan persentase 9,71 persen, nilai tersebut menurun dari Maret 2021 sebesar 1,04 juta orang atau senilai 0,43 persen dan juga menurun dari September 2020 sebesar 1,05 juta orang atau 0,48 persen. Dengan demikian, besar Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata yaitu sebesar Rp2.187.756,-/rumah tangga miskin/bulan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Integrasi Ekonomi ASEAN Dalam Menangani Covid-19

Dampak Covid-19 yang menyebabkan dampak domino di berbagai negara di dunia, termasuk di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) menjadikan ASEAN sangat berkomitmen dalam menangani Covid-19 dengan baik secara kolektif. Dalam bidang ekonomi sekaligus sebagai bentuk integrasi ekonomi kawasan, para menteri ASEAN mengadakan pertemuan antar Menteri Ekonomi ASEAN (AEM). AEM menyepakati statement “*Strengthening ASEAN's Economic Resilience in Response to the Outbreak of the Covid-19*”. Statement ini bertujuan untuk memitigasi dampak Covid-19 dengan bekerjasama dengan pihak eksternal dan mitra pembangunan. Statement tersebut juga berfokus untuk memanfaatkan teknologi, perdagangan digital dan platform fasilitasi perdagangan seperti ASEAN Single Window guna mendorong konektivitas rantai pasokan dan memungkinkan bisnis, terutama UKM untuk terus beroperasi di tengah Covid-19. Lebih lanjut, statement tersebut juga membahas cakupan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan dan berkelanjutan rantai pasokan dengan jangka panjang khususnya melalui impementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) 2025. AEM juga berkomitmen akan selalu mengatasi hambatan non-tarif, terlebih yang menghambat arus barang dan jasa dalam rantai pasokan serta menahan untuk tidak memberlakukan tindakan non-tarif yang baru ataupun yang tidak di perlukan (Organization of Economic Co-operation and Development, 2020).

ASEAN berkolaborasi dengan Mitra Pembangunan dan Dialog, di mana pada Konferensi Virtual Tingkat Menteri ASEAN-Uni Eropa berlangsung untuk membahas tantangan Covid-19. Kedua belah pihak sepakat untuk mengurangi dampak ekonomi maupun dampak sosial dan juga sepakat untuk menjaga rantai pasokan tetap terbuka dan memajukan penelitian ilmiah yang relevan. Pada Konferensi Virtual antarlembaga tingkat tinggi ASEAN-AS, 1 April 2020 mengumumkan pernyataan yang menyerukan langkah lebih lanjut guna memperkuat kolaborasi ASEAN-AS dalam menangani Covid-19, termasuk melalui Kerjasama tingkat tinggi serta Kerjasama Kesehatan masyarakat yang lebih luas (OECD, 2020).

Kemudian pada 9 April, Menteri Luar Negeri ASEAN melaksanakan pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN terkait Covid-19 guna membahas dan bertukar pandangan tentang tanggapan kolektif ASEAN terhadap penularan Covid-19 yang pesat. Hal lain yang dibahas adalah wacana pascapandemi sebagai upaya memulihkan konektivitas ASEAN baik dalam

pariwisata, bisnis normal dan kegiatan sosial untuk mencegah potensi penurunan ekonomi, juga untuk memastikan infrastruktur ASEAN dalam jalur perdagangan baik perdagangan melalui jalur udara maupun darat tetap terbuka dan juga menahan untuk tidak memaksakan pembatasan yang tidak perlu pada aliran medis, makanan dan persediaan penting lainnya. Lebih lanjut, mereka juga mengumumkan KTT ASEAN Khusus dan KTT ASEAN *Plus Three* yang juga membahas Covid-19 yang diselenggarakan pada 14 April melalui konferensi virtual. Selain itu, para Menteri Ekonomi ASEAN-Jepang juga melaksanakan pertemuan virtual pada 22 April, yang kemudian merilis pernyataan Bersama *Joint Statement on Initiatives on Economic Resilience in Response to the Covid-19 Outbreak*. Pernyataan tersebut memfokuskan pada rencana aksi ketahanan ekonomi ASEAN-Jepang. Di hari berikutnya, yaitu pelaksanaan pertemuan virtual ASEAN dan AS yang membahas tentang Kerjasama keadaan darurat Kesehatan masyarakat, terlebih dalam pemulihan pascapandemi dan melawan dampak sosial-ekonomi jangka panjang (Organization of Economic Co-operation and Development, 2020).

The Special ASEAN Summit On Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dideklarasikan pada 14 April 2020 di pertemuan virtual antar kepala negara anggota ASEAN (ASEAN, 2020). ASEAN juga tetap mengadakan KTT ASEAN Ke-36 yang diundur menjadi Juni 2020 dari agenda awal pada bulan April 2020. (OECD, 2020). Menteri Luar Negeri RI, Ibu Retno Marsudi mengatakan bahwa KTT ASEAN ke-36 menghasilkan 2 dokumen, yaitu “*Leaders Visions Statement on Cohesive and Responsive ASEAN*” dan “*ASEAN Declaration on Human Resource Development for the Changing World of Work*” (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).

Menurut Menteri Luar Negeri, yang harus digarisbawahi dari *visions statement* adalah komitmen mengurangi dampak Covid-19 dengan rencana pemulihan yang komprehensif. Dalam *visions statement* juga tercantum terkait penyelesaian kesepakatan RCEP dan penandatanganannya di tahun 2020 memiliki peran yang sangat penting. Lebih lanjut, dalam *visions statement* juga disoroti terkait koordinasi negara-negara anggota ASEAN dalam penanggulangan bencana melalui *The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA-Centre)*. Menlu juga menyampaikan bahwa inti dari dokumen kedua yang dihasilkan KTT ASEAN ke-36 adalah untuk meningkatkan SDM yang kompeten serta siap menghadapi perubahan dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN akan mengusahakan budaya belajar pada seluruh lapisan masyarakat dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya dalam mempelajari keterampilan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).

KESIMPULAN

Penurunan PDB, peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan serta penurunan jumlah pendapatan masyarakat Indonesia pada tahun 2020 akibat fenomena Covid-19, menjadikan isu keamanan ekonomi kian menonjol. Di mana hal tersebut menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia yang tidak dapat menjamin kehidupannya. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia semakin bersikeras berupaya untuk menangani serta mengurangi dampak dari Covid-19. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi serta rencana pemulihan pascapandemi adalah dengan melakukan kerjasama dengan kawasan yang kemudian diperluas dengan melakukan kerjasama bersama pihak eksternal. Istilah “upaya tidak akan mengkhianati hasil” benar adanya, dengan upaya-upaya pemerintah Indonesia baik melalui upaya nasional, kawasan hingga internasional membuahkan hasil. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan PDB, penurunan jumlah pengangguran dan penurunan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2021.

Daftar Pustaka

- ASEAN. (2020, 14 April). *Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Retrieved from asean.org: <https://asean.org/declaration-of-the-special-asean-summit-on-coronavirus-disease-2019-covid-19/>
- Association of SouthEast Asia Nations. (2022, October 12). *Overview of The AEC Monitoring*. Retrieved from <https://asean.org>: <https://asean.org/our-communities/economic-community/monitoring-regional-economic-integration/aec-monitoring/>
- Badan Pusat Statistiik. (2020, November 5). *www.bps.go.id*. Retrieved Mei 25, 2022, from [REVISI per 18/02/2021] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020, November 05). [REVISI per 18/02/2021] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021, November 05). [REVISI per 09/11/2021] Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen. Retrieved from bps.go.id: [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Agustus,poin%20dibandingkan%20dengan%20Agustus%202020.&text=Terdapat%2021%2C32%](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Agustus,poin%20dibandingkan%20dengan%20Agustus%202020.&text=Terdapat%2021%2C32%20)

- Badan Pusat Statistik. (2021, Februari 15). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022, Februari 07). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-y)*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022, Januari 17). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020, Februari 05). *Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>
- BBC. (2020, Juni 9). *Covid – 19: Kajian kasus di Wuhan muncul sejak akhir Agustus, China sebut hasil itu ‘sebagai hal yang konyol’*. Retrieved Mei 23, 2022, from www.bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852>
- BPS. (2021, Februari 5). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. Retrieved Juni 22, 2022, from www.bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- CNBC Indonesia. (2020, September 11). *Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!* Retrieved Mei 25, 2022, from www.cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius>
- Djalante, e. a. (2020). COVID-19 and ASEAN responses : Comparative policy analysis. *Elsevier* , 1-12.
- Fahrika, I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia. *INOVASI*, 206-213.
- Hakim, F. N., & Amalia, N. R. (2020). Local Government: The Impact of International Cooperation on Economic Security in Indonesia. *Atlantis Press*, 82-87.
- Hill, H., & Menon, J. (2010, Desember). ASEAN Economic Integration Features, Fulfillments, Failures and the Future. *ADB Working Paper Series*, p. 34.
- ILO. (n.d.). *Definitions: What we mean when we say “economic security”*. Retrieved Juni 22, 2022, from www.ilo.org: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Definitions%3A+What+we+mean+when+we+say+%E2%80%9Ceconomic+security%E2%80%9D>

- International Labour Organization. (2021). COVID-19 and the ASEAN labour market : impact and policy response. *ILO Brief*, 1-12.
- Kementerian Luar Negeri republik Indonesia. (2015, Maret 17). *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*. Retrieved from <https://kemlu.go.id>: https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea
- Ketua Dewan MEA Indonesia. (2021, Februari 19). *Mengenal Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (AFAS)*. Retrieved from meaindonesia.ekon.go.id: <https://meaindonesia.ekon.go.id/mengenal-kerangka-kerja-asean-di-bidang-jasa-afas/>
- Kompas Pedia. (2020, Agustus 7). *Peran ASEAN Mengawal Asia Tenggara*. Retrieved Juni 20, 2022, from <https://kompaspedia.kompas.id>: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/peran-asean-mengawal-asia-tenggara>
- Mashabi, S. (2020, September 3). *6 Bulan Pandemi Covid-19: Catatan tentang PSBB dan Penerapan Protokol Kesehatan...* Retrieved Juni 14, 2022, from www.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/09002161/6-bulan-pandemi-covid-19-catatan-tentang-psbb-dan-penerapan-protokol?page=all>
- Meydhalifah. (2020, Desember 7). *Update Kasus Covid-19 Asia Tenggara: Indonesia Nomor 1, Selisih 140.000 Kasus dari Filipina*. Retrieved Juni 12, 2022, from www.kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/07/115000065/update-kasus-covid-19-asia-tenggara--indonesia-nomor-1-selisih-140.000>
- Mukaromah, V. (2020, Maret 9). *Update Virus Corona 9 Maret: Positif di Lebih dari 100 Negara, 55,26 Persen Pasien Sembuh*. Retrieved Mei 24, 2022, from www.kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/09/072900565/update-virus-corona-9-maret--positif-di-lebih-dari-100-negara-55-26-persen?page=all>
- National Academy of Social Insurance. (2022, Oktober 12). *Economic Security for the 21st Century*. Retrieved from nasi.org: <https://www.nasi.org/reports/research/economic-security/economic-security-for-the-21st-century/>
- New York Times. (2021, Maret 17). *A Timeline of the Coronavirus Pandemic*. Retrieved Juni 8, 2022, from www.nytimes.com: <https://www.nytimes.com/article/coronavirus-timeline.html>
- OECD. (2020, Mei 4). *COVID-19 crisis response in ASEAN Member States*. Retrieved Juni 19, 2022, from www.oecd.org: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-asean-member-states-02f828a2/>
- Organization of Economic Co-operation and Development. (2020). *Covid-19 crisis response in ASEAN Member States*. *OECD*, 1-13.
- Purwanto, A. (2020, Agustus 7). *Strategi ASEAN Merespons Dampak Covid-19*. Retrieved Juni 22, 2022, from <https://kompaspedia.kompas.id>:

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/strategi-asean-merespons-dampak-covid-19>

- Qothrunnada, K. (2021, Desember 07). *Apa ang Dimaksud dengan AFTA? Ini Tujuan dan Dampaknya Bagi Indonesia*. Retrieved from <https://www.detik.com:https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5844191/apa-yang-dimaksud-afta-ini-tujuan-dan-dampaknya-bagi-indonesia>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020, Juni 26). *Menlu: KTT Ke-36 Adopsi 'Vision Statement' Pemimpin ASEAN dan Pengembangan SDM*. Retrieved from <https://setkab.go.id:https://setkab.go.id/menlu-ktt-ke-36-adopsi-vision-statement-pemimpin-asean-dan-pengembangan-sdm/>
- Wijaya, C. (2020, April 7). *PSBB Jakarta mulai 10 April selama dua minggu, namun pakar menyebut hasil efektif satu bulan untuk tekan Covid-19*. Retrieved Mei 25, 2022, from [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441](http://www.bbc.com:https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441)
- World Health Organization. (2022, Oktober 10). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. Retrieved from [covid19.who.int: https://covid19.who.int/](https://covid19.who.int:https://covid19.who.int/)
- World Health Organization. (n.d.). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. Retrieved Juni 12, 2022, from [www.who.int: https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19](https://www.who.int:https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19)